

**PERLAWANAN INDONESIA TERHADAP BELANDA
PADA ABAD XIX**

A Kardiyat Wiharyanto

Abstract

This article had a purpose to depict the struggle of Indonesian people from many region (Moluccas, Java, Sumatra, Borneo, Celebes, and Bali) towards the colonization of Dutch in 19th century. The specific purpose of each struggle was quite different, but the main point of the purpose was the same, a desire of Indonesian people to expel the Dutch from their country, Indonesia.

The result of this article showed that the struggle of Indonesian people that happened in many region represented the spirit of bravery and willingness to sacrifice. Although the technology of weapon was inferior to Dutch, Indonesian people never gave up. In small area like in Saparua or Bali, the confrontation was going so fast. On the other hand, the confrontation in Java tended to middle harsh, then in Sumatra especially Aceh, persisted for a long time. Even though the Dutch became the winner most of the time, but the battle of Indonesian people with Dutch could be a big motivation for themselves in the next movement.

A. Perlawanan Saparua 1817

Berdasarkan Traktat London I tahun 1814 (antara Belanda dan Inggris), maka semua jajahan Belanda (kecuali Kaapkoloni dan Sri Lanka) dikembalikan kepada Belanda. Ini berarti jajahan Inggris di Indonesia, yang dulu direbut dari Belanda, harus dikembalikan kepada Belanda. Bertolak dari keputusan tersebut, maka Indonesia akan dijajah kembali oleh Belanda. Dengan demikian penindasan yang pernah dilakukan terhadap rakyat Indonesia juga akan dilakukan kembali, dan memang demikian. Itulah sebabnya, rakyat Indonesia lalu melakukan perlawanan-perlawanan, yang diawali dengan perlawanan rakyat Saparua dari Maluku.

Maluku sangat penting bagi Belanda karena daerah ini merupakan penghasil rempah-rempah. Hal itu sudah dilakukan ratusan tahun oleh Belanda sampai jatuhnya VOC tahun 1799 yang kemudian

Drs. A. K. Wiharyanto, M. M., adalah dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP - Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

dikuasai oleh Inggris yang liberal. Ketika rakyat Maluku mendengar bahwa Belanda akan berkuasa kembali di Maluku, masyarakat Maluku trauma akan kembalinya sistem monopoli VOC dan Pelayaran Hongi.

Dengan adanya monopoli itu, maka harga rempah-rempah ditentukan oleh Belanda, yang biasanya sangat murah. Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap penduduk dan tidak jarang menggunakan kekerasan. Perdagangan yang dilakukan oleh penduduk Maluku dengan pedagang Jawa, Melayu dan lain-lain dianggap perdagangan gelap. Karena itu kembalinya Belanda ke Maluku tahun 1816 dicurigai bahwa mereka akan mengembalikan sistem monopoli yang menakutkan itu.

Di samping monopoli rempah-rempah, rakyat Maluku juga trauma akan kembalinya Pelayaran Hongi. Untuk mencegah jangan sampai harga cengkeh di pasaran menurun karena kebanyakan produksi, maka Belanda memaksa rakyat untuk menebang pohon cengkehnya. Untuk itu, maka dilakukan Pelayaran Hongi yaitu pelayaran bersenjata untuk membasmi pohon rempah-rempah yang dianggap berlebih sekaligus untuk mencegah perdagangan gelap. Karena tindakan yang kejam itu rakyat kehilangan mata pencahariannya dan tenggelam ke dalam kesengsaraan dan kelaparan.

Pada masa pemerintahan Inggris di Maluku timbul harapan bagi rakyat. Untuk menarik hati rakyat, penguasa Inggris mengeluarkan peraturan yang meringankan beban-beban rakyat, penyerahan paksa dihapus, dan pekerjaan rodi dikurangi. Pemasukan barang-barang dagangan dilakukan. Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama. Setelah daerah ini benar-benar kembali ke tangan Belanda, praktek-praktek lama dijalankan kembali.

Pemerintah Belanda lalu melakukan tekanan-tekanan yang berat, sehingga kembali membebani kehidupan rakyat. Selain sistem penyerahan paksa, masih terdapat beban kewajiban lain yang berat, antara lain kewajiban kerja blandong, penyerahan atap dan gaba-gaba, penyerahan ikan asin, dendeng dan kopi.

Akibat dari penderitaan rakyat itu maka rakyat Maluku pada tahun 1817 bangkit mengangkat senjata melawan kekuasaan Belanda. Perlawanan rakyat Maluku berkobar di Pulau Saparua. Tidak sedikit penduduk dari daerah pulau sekitarnya yang ikut serta dalam perlawanan itu, baik yang beragama Kristen maupun Islam bersatu padu melawan penjajah. Hal ini menunjukkan bahwa Perang Saparua

Perlawanan Indonesia Terhadap Belanda. . . (A. Kardiyat Wiharyanto)

mempunyai nada religius, karena Belanda mempersulit kehidupan beragama di daerah itu.¹

Protes rakyat di bawah pimpinan Thomas Matualessi diawali dengan penyerahan daftar keluhan-keluhan kepada Belanda. Daftar itu ditandatangani oleh 21 penguasa orang kaya, patih, raja dari Saparua dan Nusa Laut. Beberapa pemimpin lain dalam perlawanan itu ialah Anthony Rhebok, Philip Latumahina, dan raja dari Siri Sori Sayat.²

Perlawanan ini dipimpin oleh Thomas Matualessi yang kemudian termasyur dengan sebutan Pattimura. Saat itu benteng Durstede di pulau Saparua berhasil dihancurkan oleh pasukan Maluku. Residen Belanda yang bernama van den Berg, terbunuh dalam peristiwa itu. Pasukan Belanda tambahan kemudian didatangkan dari Ambon tetapi berhasil dikalahkan.

Perlawanan rakyat Saparua menjalar ke Ambon, Seram, dan pulau-pulau lainnya. Untuk memadamkan perlawanan rakyat Maluku ini, Belanda mendatangkan pasukan dari Jawa. Maluku diblokade oleh Belanda. Rakyat akhirnya menyerah karena kekurangan makanan. Untuk menyelamatkan rakyat dari kelaparan, maka Pattimura menyerahkan diri dan dikumum mati di tiang gantungan sebagai pahlawan yang tertindas oleh penjajah.

Pemimpin perlawanan rakyat Maluku digantikan oleh Khristina Martha Tiahahu, seorang pejuang wanita. Namun akhirnya ia ditangkap pula. Sewaktu akan diasingkan ke Pulau Jawa, ia meninggal di perjalanan. Akibat perlawanan rakyat Maluku ini, pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan ketat. Rakyat Maluku, terutama rakyat Saparua dihukum berat. Monopoli rempah-rempah diberlakukan kembali oleh pemerintah Belanda.

B. Perlawanan Palembang 1811-1822

Pada tahun 1804 Sultan Mohamad Baha'udin meninggal dunia setelah memerintah selama kurang lebih 27 tahun, lalu digantikan oleh putranya, Sultan Mahmud Badaruddin. Sultan baru memerintah secara depotis, punya kepribadian yang kuat dan berbakat sekali.

Dalam menghadapi lawannya, ia sangat trampil berdiplomasi

¹ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari Emporium Sampai Imperium*, jilid 1, Jakarta, PT Gramedia, 1987, hal. 371.

² *Ibid*, hal. 375.

dan mahir dalam strategi perang, organisator yang ulung, lagi pula mempunyai perhatian luas dalam pelbagai bidang, antara lain kepada sastra. Dia mengubah pantun dan menulis Syair Sinyaor Kista dan Syair Singor Nuri. Ia memiliki banyak buku sastra dalam perpustakaanya.

Akibat jatuhnya VOC, monopoli Belanda di Palembang tidak dapat dipertahankan, bahkan factorinya di tempat itu hampir lenyap. Krisis ekonomi yang dihadapi pemerintah Hindia Belanda di Palembang, mempercepat peralihan kekuasaan ke tangan Inggris.

Sebelum Jawa jatuh ke tangan Inggris sudah ada kontak antara mereka dengan Palembang. Raffles menulis surat kepada Sultan Mahmud Badaruddin agar menyingkirkan Belanda dan untuk keperluan itu Inggris akan memberi bantuan militernya.

Tanpa memberikan tanggapan terhadap tawaran itu, loji Belanda diserang oleh pasukan Sultan, dan orang-orang Belanda dibawa ke hilir untuk dibunuh (14 September 1811) . Kemudian loji diratakan dengan tanah untuk menghilangkan bekas-bekasnya. Untuk menghadapi segala kemungkinan di tempat-tempat strategis didirikan bangunan pertahanan, yang paling diperkuat adalah benteng Palembang yang dipasang ratusan meriam.³

Walaupun pertahanan diperkuat sedemikian hebatnya, Palembang dengan tidak banyak perlawanan jatuh ke tangan ekspedisi Inggris di bawah pimpinan Gillespie pada tanggal 24 April 1812. Sultan sempat mengungsi ke pedalaman. Sedangkan pimpinan pertahanan kerajaan berada di tangan Pangeran Adipati Ahmad Najamudin, seorang saudara Sultan yang ternyata tidak menunjukkan loyalitasnya kepada kakaknya, bahkan kemudian bersedia berunding dengan Inggris.

Pada tanggal 17 Mei 1812 Pangeran Najamudin mengadakan perjanjian dengan Inggris yang menentukan bahwa Pangeran Adipati Ahmad Najamudin diangkat menjadi Sultan Palembang, sedang Inggris memperoleh Bangka dan Belitung sebagai daerah kekuasaannya.

Sementara itu Sultan Badaruddin membangun pertahanan kuat di hulu Sungai Musi, yaitu mula-mula di Buaya Langu. Setelah serangan ekspedisi Inggris terhadap kubu itu gagal, pertahanan dipindah lebih ke hulu lagi, yaitu di Muara Rawas. Oleh karena aksi militer tidak berdaya untuk menundukkan Sultan Badaruddin, kemudian Inggris menempuh jalan diplomasi dan mengirim Robinson untuk berunding.

³ Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hal. 273.

Pada tanggal 29 Juni 1812 ditandatangani perjanjian yang menetapkan bahwa Sultan Badaruddin diakui sebagai Sultan Palembang, sedang Pangeran Adipati Ahmad Najamudin diturunkan dari tahta. Di samping itu diperkuat pengakuan kekuasaan Inggris atas Bangka dan Belitung; Sultan harus menanggung ongkos ekspedisi sebesar empat ratus ribu real Spanyol; mengganti kerusakan benteng Belanda sebesar dua puluh ribu real Spanyol, dan putra Sultan perlu diamankan di Jawa.

Setelah perjanjian ditandatangani, pada tanggal 13 Juli 1812 Sultan Badaruddin tiba di Palembang dan bersemayam di kraton besar, sedang Najamudin pindah ke kraton lama. Dengan campur tangan Inggris, pertentangan menjadi-jadi dan situasi politik tetap tegang. Keunggulan masing-masing pihak mengalami pasang-surut, pendudukan singgasana silih berganti. Yang jelas permainan politik Inggris semakin mengurangi kekuasaan Sultan dan kondisi-kondisi kontrak semakin diperberat.

Pada tanggal 4 Agustus 1813 Raffles mengeluarkan proklamasi yang berisi tentang restorasi kedudukan Ahmad Najamudin sebagai Sultan. Meskipun Badaruddin tidak menduduki tahta lagi tetapi tetap berwibawa serta besar pengaruhnya di kalangan rakyat.

Kembalinya kekuasaan Belanda di Indonesia tahun tahun 1816, politiknya langsung membalik situasi seperti yang diciptakan oleh Inggris. Sultan Ahmad Najamudin adalah penguasa yang lemah, sedangkan Sultan Badaruddin menguasai keadaan politik. Eksploitasi feodalistis di kalangan keluarga Sultan merajalela, banyak terjadi perampokan dalam kekosongan kekuasaan di daerah, akhirnya situasi mirip dengan anarkhi.

Pada saat itu tokoh yang dipercaya Belanda untuk mengatur Palembang adalah Muntinghe. Ia bertekad menanamkan kekuasaan yang kuat di Palembang. Untuk itu, ia menyodorkan kontrak dengan Badaruddin maupun Najamudin pada 20-24 Juni 1818. Meskipun kesultanan tidak dihapus, namun maksud Muntinghe lambat laun mengurangi kekuasaan Sultan.

Berdasarkan kontrak tersebut, Sultan Badaruddin direstorasi sebagai Sultan Palembang, sedang Najamudin diturunkan dari tahta. Walaupun demikian, masing-masing mempunyai daerah kekuasaan yang dapat dipungut hasilnya sebagai sarana penghidupannya, sedangkan sebagian besar daerah Palembang jatuh ke tangan Belanda.

Pangeran Najamudin yang disingkirkan oleh pemerintah Belanda, berusaha memperoleh bantuan Inggris. Usaha Raffles untuk memberi bantuan yang diharapkan itu gagal, sehingga akhirnya Najamudin sebagai faktor yang membahayakan pemerintah Belanda diamankan di Batavia.

Karena adanya kevakuman kekuasaan di daerah pedalaman, maka terus terjadi pergolakan. Orang-orang Minangkabau dan Melayu yang menjadi pengikut Badaruddin sewaktu dia mengungsi ke hulu Sungai Musi melakukan perlawanan terhadap ekspedisi Belanda, sehingga ekspedisi tersebut gagal.

Mengingat kaum perlawanan itu adalah pengikut Badaruddin, Belanda mencurigai Badaruddin berada di belakang perlawanan tersebut. Karena itu Sultan Badaruddin dituntut untuk memadamkan gerakan tersebut, dan segera menyerahkan putranya untuk dipindah ke Batavia.

Karena tuntutan tersebut sebagai paksaan, maka Sultan menolak, sehingga perundingan mengalami jalan buntu. Kapal-kapal Belanda yang ada di Palembang ditembaki oleh pasukan sultan. Setelah terjadi pertempuran tiga hari, Muntinghe beserta kapal-kapalnya terpaksa meninggalkan Palembang mengundurkan diri ke Bangka.

Kemennangan Sultan Badaruddin tersebut menggugah daerah-daerah lain untuk melawan Belanda, sehingga pertempuran menjaral ke Bangka, Lingga, dan Riau. Untuk menghadapi serangan Belanda, Sultan Badaruddin membangun pertahanan yang kuat di sepanjang Sungai Musi.

Sebelum mengirim tentara ke Palembang, Belanda mengangkat Pangeran Prabu Anom (putra Najamudin) sebagai Sultan Palembang. Dengan dukungan Sultan baru itu, Belanda mulai menyerang pertahanan di Plaju, tetapi dipukul mundur oleh pasukan Badaruddin. Dalam serangan yang kedua, Plaju direbut sehingga jalan ke Palembang terbuka bagi angkatan perang Belanda.

Dalam menghadapi situasi ini, Sultan Badaruddin mencoba berunding dan tidak lagi melakukan perlawanan. Pada tanggal 1 Juli 1821 kraton diduduki oleh Belanda. Sultan Badaruddin mengungsi ke hulu Sungai Musi untuk melanjutkan perlawanan. Setelah bertahan selama delapan bulan, ia ditangkap dan diasingkan ke Menado, sehingga pada tahun 1822 berakhirilah perlawanan Palembang.

C. Perang Padri 1821-1837

Meskipun masyarakat Minangkabau sudah lama memeluk agama Islam tetapi sebagian besar dari mereka masih memegang teguh adat dan menjalankan kebiasaan lama. Kebiasaan seperti minum minuman keras, berjudi dan menyabung ayam masih banyak yang melakukannya, sekalipun dalam ajaran Islam termasuk perbuatan yang terlarang.

Keadaan semacam itu terutama terjadi di lingkungan golongan masyarakat yang memang kepercayaan Islamnya masih belum tebal. Sampai beberapa lamanya tata hidup menurut Islam dan kebiasaan menurut adat masih dapat hidup berdampingan dalam masyarakat Minangkabau.

Pada permulaan abad ke-19 kembalilah tiga orang haji, yaitu Haji Miskin, Haji Piabang dan Haji Sumanik dari Mekah ke Minangkabau. Mereka menganut aliran Wahabi, suatu aliran di dalam agama Islam yang menjalankan dengan keras ajaran-ajaran agama. Mereka sangat kecewa melihat di Minangkabau merajalela perbuatan-perbuatan yang terlarang oleh agama. Mereka kurang menaati ajaran agama dan lebih dipentingkannya adat dari aturan-aturan agama, terutama di kalangan kaum bangsawan dan raja-raja (kaum adat) .

Bertolak dari kondisi tersebut, orang-orang yang baru pulang dari Mekah itu membulatkan tekad membersihkan agama Islam dari perbuatan-perbuatan yang melanggar ajaran agama dan dari adat yang masih dipegang teguh. Barang siapa melanggar ajaran agama dihukum dengan berat sekali. Kewajiban agama harus ditepati betul-betul.

Orang-orang yang ikut gerakan tiga orang ulama itu juga berpakaian putih-putih sehingga disebut Orang Putih atau Orang Padri. Nama Padri mungkin juga asalnya dari nama Pedir, suatu daerah di Aceh. Pada waktu itu Pedir menjadi pusat orang-orang yang pergi naik haji. Namun ada juga yang mengatakan bahwa nama Padri berasal dari kata Portugis padri yang berarti pastor (ulama) agama Katolik, karena kaum Padri memakai jubah seperti pastor.

Gerakan Padri makin besar pengaruhnya di Minangkabau. Mula-mula dipimpin oleh Tuanku Nan Renceh, kemudian oleh Datuk Bendaharo, Tuanku Pasaman dan Malim Basa. Di antara pemimpin itu yang sangat terkenal adalah Malim Basa yang kemudian dikenal sebagai

Tuanku Imam Bonjol.

Kedudukan raja-raja dan kaum bangsawan menjadi genting. Di bawah pimpinan Suraaso, kaum adat melakukan perlawanan. Namun mereka kehilangan kekuasaan dan pengaruh mereka, bahkan perlawanan mereka dipatahkan oleh kaum Padri, dan banyak di antara mereka diusir dari Minangkabau.

Karena para raja dan bangsawan itu kedudukannya makin terdesak, maka mereka minta bantuan kepada Raffles (1818) yang berkedudukan di Bangkahulu (Bengkulen). Mula-mula ia menyanggupi bantuan itu, tetapi atas protes pemerintah Belanda yang kembali lagi di Padang, ia mendapat peringatan dari pemerintah pusat Inggris, sehingga ia mengurungkan pemberian bantuan itu. Karena itu kaum adat minta bantuan Belanda.

Pada tahun 1821 datanglah tentara Belanda dibawah pimpinan Kolonel Raaff, yang dapat memukul mundur kaum Padri, lalu mendirikan benteng Fort van der Capellen di Batusangkar tahun 1822. Kemudian Jenderal de Kock mendirikan benteng Fort de Kock di Bukittinggi. Walaupun kota-kota besar dikuasai Belanda, tetapi dengan menjalankan siasat perang gerilya kaum Padri tetap berkuasa. Dalam konflik itu kaum adat cenderung kepada pihak Belanda, dan memang kaum adat meminta pihak Belanda untuk melawan kaum Padri.

Pada tahun 1825 di Jawa mulai berkobar perang Diponegoro. Belanda menilai bahwa perang Diponegoro lebih berbahaya dari pada Perang Padri. Karena itu, pasukan Belanda yang bertugas di Sumatera Barat harus dikurangi untuk dikerahkan ke Jawa. Karena kondisi tersebut Belanda menggunakan taktik berdamai dengan pihak Padri. Perdamaian itu diadakan pada tahun 1825.

Pada saat terjadi gencatan senjata tersebut, ternyata Belanda melakukan tekanan-tekanan kepada penduduk setempat, sehingga akhirnya meletuslah perlawanan kembali dari pihak kaum Padri diikuti oleh rakyat setempat. Perlawanan segera menjalar kembali ke berbagai tempat. Tuanku Imam Bonjol mendapat dukungan Tuanku nan Gapuk, Tuanku nan Cerdik, dan Tuanku Hitam, sehingga mulai tahun 1826 volume pertempuran semakin meningkat.

Setelah Perang Diponegoro selesai (1830), pasukan Belanda yang berada di Jawa dikerahkan kembali ke Sumatera Barat untuk menghadapi kaum Padri. Salah satu markas kaum Padri yang berada di

Tanjung Alam diserang oleh pasukan Belanda (1833) . Akibat pertempuran tersebut, pasukan Padri melemah karena beberapa pemimpin Padri menyerah, misalnya Tuanku nan Cerdik. Sejak itu perlawanan-perlawanan terhadap Belanda dipimpin sendiri oleh Tuanku Imam Bonjol.

Sejak tahun 1830 kaum Padri mendapat bantuan dari kaum adat. Mereka mau bersatu dengan kaum Padri karena ingin mempertahankan kemerdekaan mereka dari penjajah Belanda. Mereka sadar, bahwa pemerintahan Belanda bagi mereka adalah rodi, menyediakan keperluan Belanda, pemerasan dan ekspedisi-ekspedisi yang kejam.

Walaupun telah mendapat bantuan dari kaum adat, tetapi kekuatan kaum Padri semakin merosot. Sebaliknya, kekuatan Belanda semakin bertambah kuat. Pasukan Diponegoro yang menyerah kepada Belanda dikerahkan untuk menumpas kaum Padri, termasuk Basah Sentot Prawiradirja (walaupun akhirnya ia dicurigai mengadakan hubungan dengan kaum Padri sehingga ditangkap lagi) .

Untuk mempercepat penyelesaian Perang Padri, Gubernur Jenderal van den Bosch datang ke Sumatera Barat untuk menyaksikan sendiri keadaan di medan pertempuran. Ia mengeluarkan pernyataan gubernemen yang terkenal dengan nama Pelakat Panjang. Pernyataan itu memberi hak-hak istimewa kepada mereka yang memihak Belanda.

Dalam kondisi terjepit, pihak Belanda mengajak Imam Bonjol untuk berunding. Tetapi perundingan perdamaian itu oleh Belanda hanyalah dipakai untuk mengetahui kekuatan yang terakhir di pihak Padri, yang ada di benteng Bonjol, sementara mengharapkan Imam Bonjol mau menyerahkan diri.

Perundingan gagal karena pihak Belanda memang telah melakukan persiapan untuk mengepung benteng tersebut. Jenderal Michiels memimpin sendiri pengepungan kota Bonjol. Dengan susah payah kaum Padri menghadapi kekuatan musuh yang jauh lebih kuat. Pada akhirnya benteng kaum Padri jatuh ke tangan Belanda. Tuanku Imam Bonjol beserta sisa-sisa pasukannya tertawan pada tanggal 25 Oktober 1837. Imam Bonjol lalu dibuang ke Cianjur, lalu dipindah ke Ambon dan akhirnya dibuang ke Minahasa.

Tertangkapnya Imam Bonjol memang tidak berarti berhentinya perlawanan-perlawanan, tetapi penyerahan itu cukup melumpuhkan kegiatan kaum Padri. Secara kecil-kecilan pertempuran masih dilakukan

oleh pimpinan kaum Padri yang lain, yaitu Tuanku Tambose. Namun setelah itu akhirnya patahlah perlawanan kaum Padri. Semenjak itu Minangkabau diperintah langsung oleh Belanda.

D. Perang Diponegoro 1825-1830

Sejak Daendels berkuasa, maka wilayah kekuasaan raja-raja Jawa, terutama Yogyakarta dan Surakarta, makin dipersempit. Hal ini disebabkan karena banyak daerah yang diberikan kepada Belanda sebagai imbalan atas bantuannya. Adapun daerah yang diinginkan Belanda adalah daerah pantai utara Jawa. Karena itu daerah-daerah tersebut berangsur-angsur diambil-alih oleh Belanda. Daerah Kerawang dan Semarang dikuasai oleh Belanda pada tahun 1677, dan pada tahun 1743 daerah Cirebon, Rembang, Jepara, Surabaya, Pasuruan dan Madura. Dengan hilangnya daerah-daerah pesisir, kerajaan Mataram makin melepaskan kegiatan pelayaran dan perdagangannya, dan memusatkan kegiatannya pada bidang pertanian.

Di samping makin sempitnya wilayah kerajaan yang bisa memperkecil kekuasaan raja, juga dapat menyebabkan kecilnya penghasilan kerajaan. Raja makin lama makin tergantung kepada Belanda. Untuk membiayai pemerintahan kerajaan saja ia semakin tergantung pada uang pengganti dari Belanda di samping dari hasil pajak penghasilan dari daerah yang masih dikuasainya.

Untuk menambah penghasilan, banyak dilakukan penarikan cukai sebagai sumber penghasilan tertentu yang diborongkan kepada orang Cina. Pemborongan itu misalnya terjadi pada cukai jalan, jembatan dan sarang burung. Akibat dari sistem pemborongan ini beban rakyat makin berat. Pemborong banyak melakukan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga pemungutan pajak sering dilakukan secara sewenang-wenang.

Jembatan-jembatan, pasar dan sebagainya terdapat gerbang cukai. Orang-orang yang melalui gerbang itu harus membayar cukai. Hal ini sangat menyusahkan lalu lintas, meninggikan harga barang dan menyusahkan kehidupan rakyat. Juga gerbang-gerbang ini disewakan kepada orang Cina dengan akibat-akibatnya yang tak menyenangkan. Pemerintah Belanda tidak mau menghapuskan gerbang-gerbang itu, lantaran gerbang-gerbang mendatangkan penghasilan yang bukan sedikit bagi pemerintah.

Pada tahun 1823 Gubernur Jenderal van der Capellen memerintahkan agar tanah-tanah yang disewa dari kaum bangsawan dikembalikan lagi kepada yang empunya, dengan perjanjian, bahwa uang sewa dan biaya lainnya harus dibayar kembali kepada si penyewa. Dengan demikian beban para bangsawan juga sangat berat karena uang sewa itu sudah dibelanjakan.

Perpecahan di kalangan keluarga kerajaan di Mataram tidak saja melemahkan kerajaan, tetapi juga menyebabkan pengaruh Belanda makin menjadi kuat. Setiap pertentangan antar keluarga bangsawan di kraton akan mengundang campur tangan pihak Belanda, yang pada akhirnya merugikan kerajaan itu sendiri sebagai keseluruhan.

Pada masa Daendels terdapat usaha mencampuri urusan tatacara di istana. Misalnya, Daendels menghendaki persamaan derajat dengan Sultan pada waktu upacara kunjungan resmi diadakan di kraton. Dalam upacara tersebut pembesar Belanda supaya diijinkan duduk sejajar dengan raja, dan sajian sirih supaya dihapuskan. Raffles juga meneruskan usaha yang sama terhadap kehidupan kraton.

Kondisi seperti itu menimbulkan rasa kekecewaan dan ketidak-senangan di antara beberapa golongan bangsawan. Mereka menganggap bahwa martabat kerajaan menjadi merosot akibat tindakan Belanda tersebut. Tambahan lagi setelah kebiasaan minum-minuman keras beredar di kalangan kaum bangsawan atau rakyat umum, kekhawatiran dan kekecewaan di kalangan golongan agama di istana makin meningkat.

Kekecewaan di kalangan kraton dan semakin beratnya beban rakyat menyebabkan sebagian besar rakyat merasa tertekan hidupnya. Ibarat api dalam sekam, kebencian rakyat sewaktu-waktu dapat meledak, bila sumbu letupnya sudah terbakar. Suasana pada umumnya gelisah dan jika ada seseorang saja yang dapat menyusun tenaga rakyat, niscaya akan meletus api pemberontakan yang besar.

Pada saat segenting itu muncullah seorang pemimpin besar, yang dapat membimbing rakyat, yaitu Pangeran Diponegoro. Ia adalah putra sulung Sultan Hamengku Buwono (HB) III dari garwa ampeyan. Dilahirkan pada tanggal 11 November 1785 dengan nama kecil Raden Mas Ontowiryo. Sejak kecil beliau dididik oleh neneknya, Kanjeng Ratu Ageng di Tegalrejo, terkenal sebagai orang yang amat saleh. Buah usahanya ternyata sekali pada diri Diponegoro. Beliau selalu berusaha memperdalam soal agama.

Untuk memperkuat imannya, beliau sering mengasingkan diri di tempat-tempat yang jauh, bertapa dan mengembara, sehingga dengan sendirinya banyak orang tertarik oleh kepribadiannya. Sebagai orang yang sangat saleh, beliau tidak mementingkan keduniawian, dan selalu mengingat kepentingan umum. Terdesak oleh keadaan maka beliau bertindak untuk mempertahankan kedudukan para bangsawan dan membela nasib rakyat kecil.

Sewaktu Inggris masih berkuasa, Sultan Hamengku Buwono III dan Raffles pernah menjanjikan kepada Pangeran Diponegoro akan naik tahta sebagai pengganti ayahnya. Namun setelah Sultan Hamengku Buwono III wafat tahun 1814, yang menggantikan bukan Diponegoro tetapi adiknya yakni Mas Jarot dengan gelar Sultan Hamengku Buwono IV (HB IV), sedang Pangeran Diponegoro diangkat sebagai penasehatnya.

Pengaruh Pangeran Diponegoro terhadap Sultan HB IV besar sekali. Atas desakan Pangeran Diponegoro, Sultan HB IV pernah mencabut keputusannya yang telah disampaikannya kepada residen Belanda. Karena kehidupan HB IV yang kebarat-baratan, maka wafatnya yang tiba-tiba tahun 1822, dianggap oleh Diponegoro sebagai kutukan.

Sepeninggal HB IV, yang diangkat sebagai Sultan bukan Pangeran Diponegoro tetapi Raden Mas Menol dengan gelar Sultan HB V. Karena raja tersebut baru berusia tiga tahun, maka pemerintah Belanda mengangkat beberapa orang wali yaitu Pangeran Diponegoro, Pangeran Mangkubumi, Ibu dan Nenek Sultan. Dengan kedudukannya itu, pengaruh Pangeran Diponegoro semakin bertambah besar.⁴

Melihat pengaruh Diponegoro yang sebesar itu, baik di kalangan istana maupun di segala lapisan masyarakat, sebetulnya pemerintah Belanda menyesal memilih beliau sebagai wali Sultan. Dari sebab itu diaturnya supaya wali-wali tersebut jangan sampai ikut campur dalam pemerintahan.

Melihat kondisi Kesultanan dinilai mengancam kekuasaan Belanda, maka Belanda menetapkan bahwa pemerintahan diserahkan kepada Patih Danurejo dan di bawah pengawasan residen. Pangeran Diponegoro yang menyadari maksud dan tujuan siasat Belanda itu menganggap bahwa kedudukannya sebagai wali Sultan bertentangan

⁴ D.G.E. Hall, *A History of South-East Asia, Third Edition*, the Macmillan Ltd, London, 1977, hal. 544.

dengan aturan-aturan agama sehingga ia menolak pengangkatan tersebut. Lebih-lebih karena Pangeran Diponegoro melihat sendiri tindakan-tindakan pegawai pemerintah Belanda yang benar-benar menyakitkan hati, misalnya:

1. Residen Nahuys memasukkan adat-istiadat dan pakaian Eropa di kraton.
2. Makin banyak tanah disewakan kepada orang-orang Eropa, bahkan Nahuys sendiri membuka kebun yang luas.
3. Tindakan-tindakan pegawai pemerintah Belanda yang bersikap mengejek terhadap Pangeran Diponegoro.

Kebijaksanaan lain yang dianggap melecehkan Diponegoro adalah perbuatan residen dan patih yang selalu mengambil keputusan-keputusan dengan tidak dirundingkan terlebih dahulu dengan Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi. Misalnya, mengangkat seorang penghulu itu adalah hak Sultan. Tetapi waktu penghulu Rachmanudin berhenti lantaran berbeda pendapat dengan patih, maka residen dan patih mengangkat penggantinya tidak dengan persetujuan para wali. Pangeran Diponegoro menganggap pengangkatan itu tidak sah.

Sekali peristiwa Pangeran Diponegoro diperlakukan tidak pantas oleh dua orang pegawai Belanda, dalam pesta di rumah patih. Beliau terus meninggalkan perayaan tersebut, lalu mengasingkan diri di Tegalrejo.

Pada waktu residen dan patih menyuruh menyambung jalan dari kota ke Tegalrejo (Jalan Notoyudan) yang akan melalui tempat yang dianggap keramat oleh Diponegoro, maka Diponegoro menentangnya. Di samping akan melalui tempat yang keramat dan tidak dirundingkan lebih dahulu, Pangeran Diponegoro menilai bahwa jalan tersebut akan digunakan untuk memperlancar serangan Belanda ke Tegalrejo.

Peristiwa tersebut menyebabkan Pangeran Diponegoro tidak dapat menahan kesabarannya lagi. Beliau meminta agar patih dipecat, tetapi ditolak oleh residen. Karena itu Pangeran Diponegoro menyuruh mengganti tonggak-tonggak pemancang jalan yang akan dibuat dicabut diganti dengan bambu runcing.

Pemerintah Belanda mengutus Pangeran Mangkubumi ke Tegalrejo untuk memanggil Diponegoro mempertanyakan tindakan-tindakan Diponegoro itu. Beliau tahu bahwa beliau akan ditangkap jika beliau mengabaikan panggilan itu. Pangeran Mangkubumi sendiri

akhirnya tidak mau pulang ke kota. Akibatnya pasukan Belanda menyerbu ke Tegalrejo sehingga akhirnya pada tanggal 25 Juli 1825 berkobarlah perlawanan Diponegoro. Dalam pertempuran tersebut, Pangeran Diponegoro bersama keluarganya berhasil melepaskan diri dari serbuan Belanda itu.

Setelah pertempuran di Tegalrejo ini, Diponegoro dengan pasukannya menyingkir ke Gua Selarong, sekitar 15 km sebelah barat daya kota Yogyakarta, guna mengatur siasat perang selanjutnya. Keluarga Pangeran Diponegoro diungsikan ke Dekso (Kulon Progo) .

Kabar mengenai meletusnya perlawanan Diponegoro terhadap Belanda meluas ke berbagai daerah. Rakyat petani yang telah lama menderita dalam kehidupannya, banyak yang segera datang untuk ikut serta dalam perlawanan. Demikian pula para ulama dan bangsawan yang kecewa terhadap Belanda bergabung dengan Diponegoro. Daerah-daerah lain juga menyambut perlawanan Diponegoro dengan melakukan perlawanan terhadap Belanda.

Kyai Mojo, seorang ulama dari daerah Surakarta, datang untuk bergabung dengan Diponegoro. Bersama dengan Kyai ini dibentuklah kelompok pasukan. Semboyan Perang Sabil dikumandangkan ke segenap pengikutnya, baik yang ada di daerah Selarong maupun yang ada di daerah lain. Malahan seorang Kyai yang bernama Hasan Besari diutus Diponegoro untuk menyebarkan Perang Sabil di daerah Kedu.

Di samping para tokoh ulama, Diponegoro juga mendapat dukungan para bupati Monconegoro. Di antaranya yang terkenal adalah Alibasya Sentot Prawirodirjo dari Madiun yang kemudian menjadi Panglima Perang Diponegoro. Itulah sebabnya pada tahun-tahun pertama pertempuran dengan cepat meluas sampai ke daerah Pacitan, Purwodadi, Banyumas, Pekalongan, Semarang, Rembang, Kertosono dan Madiun.

Sementara itu tokoh-tokoh yang memihak Belanda untuk menentang perlawanan Diponegoro antara lain Patih Danurejo, Sunan Surakarta, raja-raja dari Madura.⁵

Dalam pertempuran di Kertosono, rakyat dipimpin langsung oleh Bupati Kertosono, pertempuran di Banyumas, rakyat dipimpin oleh Pangeran Suriatmojo, perlawanan di Madiun dipimpin oleh Bupati

⁵ Gilbert Khoo, *Sejarah Asia Tenggara Sejak Tahun 1500*, Kualalumpur, Penerbit Fajar Bakti, 1976, hal. 27.

Kertodirjo dan Pangeran Serang, sedang perlawanan di Plered dipimpin oleh Kertopengalasan. Dalam pertempuran di daerah Lengkong (1826), Belanda dipukul mundur, seorang letnan Belanda tewas dan dua orang bangsawan gugur.

Dalam pertempuran-pertempuran dari tahun 1825 sampai 1826 kemenangan ada di pihak Diponegoro. Hal ini disebabkan (1) semangat perang pasukan Diponegoro masih tinggi, (2) siasat gerilya yang dilakukan Diponegoro belum tertandingi, dan (3) sebagian pasukan Belanda masih berada di Sumatera Barat dalam rangka Perang Padri. Karena itu tawaran Belanda untuk melakukan perdamaian selalu ditolak oleh Diponegoro.

Melihat semakin kuatnya Diponegoro dan semakin meluasnya medan pertempuran, maka Belanda menilai bahwa perlawanan Diponegoro sangat membahayakan kedudukan Belanda di Indonesia. Itulah sebabnya Belanda lalu menggelar berbagai siasat untuk menumpas atau menghentikan perlawanan Diponegoro itu.

Dalam rangka untuk menghadapi perlawanan Diponegoro itu, Belanda melakukan siasat-siasat sebagai berikut:

1. Sultan HB II (Sultan Sepuh) yang dibuang Raffles ke Pulau Penang, dikembalikan ke Yogyakarta dengan tujuan mendatangkan perdamaian sehingga para bangsawan yang memihak Diponegoro diharapkan kembali ke kraton. Usaha tersebut gagal karena Sultan Sepuh kurang berwibawa lagi bahkan tidak lama kemudian terus wafat sehingga para bangsawan tetap melakukan perlawanan.
2. Jenderal de Kock berusaha memecah belah pengikut Diponegoro. Para bangsawan dibujuknya supaya pulang ke ibu kota. Mereka tidak akan dituntut. Juga kedudukan, uang dan sebagainya kerap kali dipergunakan sebagai pemikat hati. Usaha de Kock ini rupanya berhasil juga, sebab Kyai Mojo, Pangeran Kusumonegoro, Sentot dan lain-lain meninggalkan Diponegoro, sehingga akhirnya beliau tinggal seorang diri. Kyai Mojo diasingkan ke Minahasa, sedang Sentot dikirim ke Sumatera untuk memerangi kaum Padri, namun akhirnya ditangkap lagi dan dibuang ke Bangkahulu.
3. Untuk mempersempit ruang-gerak Diponegoro, Jenderal de Kock menggunakan taktik bentengstelsel (perbentengan), yaitu mendirikan benteng-genteng di tiap daerah yang direbut

dan kemudian dijaga oleh sepasukan prajurit, dan benteng itu saling berhubungan. Penduduk daerah itu tetap tenang dan tidak ikut bertempur. Benteng-benteng tersebut dibangun di Gombang, Purworejo, Magelang, Ambarawa dan Salatiga.

4. Sesudah Diponegoro semakin terjepit, Belanda melakukan pendekatan agar Diponegoro mau diajak untuk melakukan perundingan perdamaian. Perundingan semacam itu pernah di Klaten tahun 1827, tetapi gagal.

Karena bala bantuan Belanda terus berdatangan, maka posisi tentara Pangeran Diponegoro semakin terjepit sehingga sering terjadi pertempuran terbuka. Akibatnya pengikut-pengikut setianya semakin kecil sebab Pangeran Suryomataram dan Prangwadono tertangkap, sedangkan Pangeran Serang dan Pangeran Notoprojo menyerah. Pangeran Ario Papak dan Sosrodilogo (Rembang) juga menyerah.

Pada tahun 1829 Pangeran Mangkubumi dan Alibasya Sentot Prawirodirjo mengambil keputusan menyerahkan diri sebelum dikalahkan. Sampai tahun 1829 tersebut kira-kira 200 ribu pasukan Diponegoro telah gugur. Oleh karena kondisinya yang semakin terdesak dan melihat kedudukannya yang sudah tidak ada harapan lagi, maka Diponegoro bersedia untuk melakukan perundingan.⁶

Melalui Kolonel Kleerens, pada tanggal 16 Pebruari 1830 Diponegoro mau melakukan pertemuan di desa Romo Kamal. Dalam pertemuan itu dibuat syarat-syarat perundingan sebagai berikut:

- a. Bilamana dasar perundingan tidak dapat disetujui oleh Diponegoro, beliau boleh kembali secara bebas.
- b. Dalam perundingan itu Diponegoro harus jauh dari tentaranya, sedang tentaranya tidak boleh membawa senjata.

Rencana perundingan perdamaian itu dilakukan di kota Magelang. Karena pada saat itu kebetulan bulan Puasa, maka perundingan itu ditunda. Dalam pada itu bertambah pengikut Diponegoro yang masuk kota Magelang. Sehabis Puasa Jenderal de Kock mengajak melakukan perundingan. Namun Diponegoro belum bersedia karena masih dalam suasana Lebaran.

Setelah berunding, Jenderal de Kock mendesak Diponegoro mengemukakan tuntutan-tuntutannya. Pada saat itu Diponegoro

⁶ *Ibit.*

menghendaki menjadi kepala agama Islam (Panatagama) di Jawa agar supaya dapat memelihara kerohanian rakyat. Tuntutan itu ditolak oleh pemerintah Belanda.

De Kock takut kalau-kalau Diponegoro akan menyerang lantaran pengikutnya kian hari kian banyak yang masuk kota Magelang. Sementara pemerintah Negeri Belanda mendesak de Kock agar segera menghentikan perlawanan dengan cara apapun agar melapangkan jalan bagi pelaksanaan Culturstelsel. Di samping itu, de Kock juga terancam dipecat jika Diponegoro sampai lepas kembali.

Dengan berbagai alasan tersebut, Pangeran Diponegoro ditangkap di tempat perundingan tersebut. Diponegoro kemudian dibawa ke Manado dan pada tahun 1834 dipindahkan ke Makasar dan di sana beliau wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Makam beliau hingga kini menjadi tempat ziarah bangsa Indonesia.

Perlawanan Pangeran Diponegoro membawa akibat yang cukup berat. Korban di pihak Belanda sebanyak 15000 tentara, terdiri dari 8000 ribu orang Eropa, dan 7000 orang serdadu pribumi. Biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai perang itu tidak kurang dari 20 juta gulden. Di samping itu, tidak sedikit perkebunan-perkebunan swasta asing yang rusak. Kemakmuran rakyat lenyap sama sekali.

Akibat perlawanan Diponegoro, maka batas-batas Surakarta dan Yogyakarta diubah, daerahnya diperkecil. Berhubungan dengan tindakan ini, maka Sunan Paku Buwono VI merasa kecewa sekali, lalu meninggalkan ibu kota. Pemerintah Belanda menaruh curiga, lalu Sunan ditangkap dan dibuang ke Ambon (1849) . Dengan demikian maka berakhirilah perlawanan penghabisan dari raja-raja Jawa.

E. Perang Kalimantan, Sulawesi dan Bali

Kejadian di luar Pulau Jawa, selain dari perlawanan Saparua, Palembang, Minangkabau, dan Aceh masih banyak lagi daerah-daerah yang melakukan perlawanan terhadap Belanda, misalnya perlawanan di Kalimantan, Sulawesi dan Bali.

1. Perlawanan Rakyat Kalimantan

Sejak dulu, sebelum VOC, di Kalimantan Barat terdapat kampung-kampung Melayu dan Jawa. Mereka datang dan bertempat tinggal di situ untuk berdagang. Kira-kira permulaan abad ke-16 maka

terdapatlah di Kalimantan Barat kerajaan-kerajaan Sukadana (sebelah selatan), kerajaan Landak (tengah) dan kerajaan Sambas (utara) .

Dalam permulaan abad ke-17 orang Belanda mengunjungi Sukadana, oleh karena mereka mendengar, bahwa daerah itu menghasilkan emas. Juga Sambas mereka kunjungi dan VOC lalu mengadakan perjanjian dengan raja Sambas yang berisi :

- a. Akan dijualnya berlian kepada VOC dengan harga yang ditetapkan.
- b. Kedua pihak akan bekerja sama mempertahankan diri terhadap serangan-serangan bangsa Portugis.
- c. Bangsa Eropa lainnya tidak diijinkan berdagang di situ.

Raja Sambas mengharapkan bantuan VOC jika berperang dengan Brunei. Tetapi VOC tidak bersedia, sehingga hubungan Sambas-Belanda putus. Sikap Belanda dengan kerajaan Sukadana juga sama sehingga Sukadana-Belanda juga terjadi pertikaian.

Dalam tahun 1735 di Matan (Kalimantan Barat bagian selatan) datang seorang ulama Arab yang bernama Syarif Husain, berhasil memperoleh pengaruh besar. Kemudian ia terpaksa meninggalkan daerah itu lantaran berselisih dengan raja Matan. Ia lalu pindah ke Mampawa dan meneruskan pekerjaannya sebagai ulama.

Di kalangan rakyat, Syarif Husain sangat populer dan berpengaruh, lebih-lebih setelah diangkat menjadi patih. Pada tahun 1742 seorang putra laki-laki lahir dari perkawinannya dengan putri Dayak, diberi nama Syarif Abdurachman. Sebagai anak muda yang tampan, dia telah menunjukkan bakat dan ambisinya. Akhirnya ia diambil menantu Sultan Banjarmasin.⁷

Dalam perkembangannya, Syarif Abdurachman mendirikan kerajaan baru dekat muara sungai Kapuas yang diberi nama Pontianak (7 Januari 1772) . Hubungan VOC dengan Pontianak berkembang baik, bahkan Pontianak membantu Belanda menghancurkan kerajaan Sukadana dan Mampawa. Sejak itu kerajaan-kerajaan tersebut tidak berarti lagi, lebih-lebih setelah para pedagang banyak yang pindah ke Pontianak.

Pada saat itu banyak imigran Cina yang masuk ke Kalimantan Barat dari Brunei. Mereka berdagang atau bekerja di tambang emas di

⁷ Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hal. 283.

Mampawa dan Sambas. Lambat laun kongsi-kongsi dagang Cina bertambah besar pengaruhnya di Mampawa maupun di Sambas, sehingga mereka merupakan suatu negara di dalam negara.

Kongsi-kongsi itu bukan saja mempertahankan kepentingan-kepentingan perdagangan, tetapi juga turut campur dalam lapangan politik. Mereka berhasil memperoleh hak mengatur pemerintahan, pengadilan dan kepolisian sendiri di daerah-daerah yang berpenduduk Cina.

Kekuasaan Cina seperti itu terkenal sekali ialah yang terdapat di Monterado (daerah Sambas) dan Mandor (daerah Pontianak) . Begitu besar pengaruh bangsa Cina, sehingga raja Sambas dan Pontianak minta bantuan pihak Belanda menaklukkan mereka. Walaupun sementara bangsa Cina dapat dikalahkan, tetapi perlawanan berkobar terus, sehingga tentara Belanda mundur ke Sambas dan Pontianak. Berhubungan dengan meletusnya Perang Diponegoro di Jawa, maka Belanda tak dapat bertindak keras terhadap bangsa Cina yang ada di Mandor dan Monterado itu.

Pada tahun 1850 pemerintah Belanda baru dapat melanjutkan usaha baru menghadapi orang-orang Cina. Untuk menghadapi perlawanan orang-orang Cina itu, Belanda merintang perdagangan Cina dengan menutup muara-muara sungai dan memberantas perdagangan candu gelap. Tetapi orang Cina di Mandor dan Monterado masih tetap mempertahankan kedudukannya. Baru pada tahun 1888 perlawanan Cina dapat dipatahkan.

Sementara itu di Kalimantan Selatan juga ada kerajaan yang juga melawan Belanda, yaitu Banjarmasin. Nama Banjarmasin sudah disebut-sebut sejak zaman Majapahit, juga pada zaman kerajaan Demak. Agama Islam masuk ke Banjarmasin sekitar tahun 1530, dan sejak itu pula mengakui Demak sebagai yang dipertuan.

Pada abad ke-17, VOC mengadakan hubungan dengan Banjarmasin. Tetapi tidak lama kemudian putuslah hubungan itu sesudah anak buah kapal VOC dibunuh di situ. Kota Banjar dibakar oleh Belanda, sehingga ibukota Banjarmasin pindah ke kota Martapura (1612) .

Kemudian VOC mengadakan kontak lagi dengan sultan Banjarmasin di Martapura. Kedua pihak menandatangani suatu perjanjian yang menyatakan:

- a. Belanda mendapat monopoli perdagangan lada.
- b. Belanda diperbolehkan mendirikan loji di Banjarmasin.

Walaupun sudah ada persetujuan dengan Belanda, Sultan Banjarmasin masih mengizinkan Inggris untuk bertempat tinggal di kota Banjarmasin. Ini mengakibatkan terjadinya pertentangan antara Banjarmasin dengan Belanda. Sejak peristiwa itu hubungan antara Banjarmasin dengan Belanda tidak pernah baik.

Dalam tahun 1780 berkobar perang saudara di Banjarmasin, lantaran perebutan tahta. Pangeran Nata memerintahkan, supaya membunuh semua putra Sultan yang baru saja wafat. Hanya seorang, ialah Pangeran Amir, dapat menyelamatkan diri.

Antara kedua pangeran itu timbullah pertikaian. Karena Pangeran Nata minta bantuan Belanda, maka Pangeran Amir terpaksa menyerah. Kemudian ia dibuang ke Sailan (Sri Lanka) . Dengan demikian Pangeran Nata duduk di tahta kerajaan Banjarmasin. Sebagai upah atas bantuan Belanda itu, Sultan mengakui kekuasaan Belanda dan memberi hak kepadanya untuk mengesahkan pengangkatan putera mahkota dan pegawai-pegawai terpenting. Belanda juga berhak mengatur penghasilan negara dan mendapat monopoli perdagangan lada di kerajaan itu.

Pada masa pemerintahan Daendels, Banjarmasin ditinggalkan oleh Belanda. Namun pada tahun 1817 Belanda kembali lagi ke Banjarmasin, sehingga mulai pertengahan abad ke-19 timbul lagi persoalan-persoalan karena sebagian rakyat dan anggota istana mulai menentang kebijakan Belanda.

Di kalangan istana yang anti Belanda, antara lain Pangeran Hidayat. Pengangkatan Pangeran Tamjidillah yang tidak disenangi rakyat menjadi Sultan semakin memperuncing keadaan. Sebab rakyat lebih menyukai dan menganggap Pangeran Hidayat lebih berhak untuk menduduki tahta kerajaan. Tetapi Belanda tetap menobatkan Tamjidillah.

Dengan adanya campur tangan Belanda dalam penggantian Sultan, maka rakyat melakukan perlawanan terhadap Sultan baru dan kemudian perlawanan diarahkan kepada Belanda. Dalam perlawanan ini Pangeran Hidayat berpihak kepada rakyat yang mengadakan perlawanan. Perlawanan rakyat Banjar terhadap Belanda berkobar pada tahun 1859 di bawah pimpinan Pangeran Antasari. Tokoh-tokoh lain

yang membantu memimpin pertempuran antara lain Kyai Demang Leman, Haji Nasrun, Haji Buyasin dan Kyai Langlang.

Perlawanan pertama dilakukan dengan menyerbu pos-pos Belanda. Tidak kurang dari 3000 pasukan Antasari menyerang kedudukan Belanda. Kemudian penyerangan dilanjutkan untuk menggempur benteng Belanda di Tabanio. Setelah diserbu berkali-kali benteng tersebut berhasil diduduki.

Sewaktu pertempuran masih terus berlangsung, pemerintah Belanda memecat Pangeran Hidayat selaku Mangkubumi, karena ia menolak menghentikan perlawanan. Pada tahun 1860 jabatan Sultan kosong dan jabatan Mangkubumi dihapuskan, sehingga akhirnya kerajaan Banjarmasin dihapuskan, serta diperintah langsung oleh pemerintah Belanda.

Tindakan Belanda tersebut semakin membangkitkan perlawanan-perlawanan rakyat di berbagai daerah seperti di Tanah Laut, Hulu Sungai Barito, dan Kapuas Kahayan. Akibatnya Belanda semakin kewalahan. Karena itu Belanda segera mendatangkan bantuan dari luar Banjar, sehingga pasukan Belanda semakin kuat dan setapak demi setapak berhasil memukul perlawanan rakyat.

Akibat tekanan-tekanan yang semakin berat dari pihak Belanda, maka akhirnya beberapa orang pemimpin perlawanan tertangkap dan ada yang menyerah. Pangeran Antasari meninggal tahun 1861. Pangeran Hidayat tertangkap tahun 1862 dan dibuang ke Jawa. Kyai Demang Leman tertawan, tetapi lalu berhasil melarikan diri untuk melanjutkan perlawanan.

Meskipun pemimpin-pemimpin utamanya satu persatu telah dapat diatasi, namun perlawanan rakyat terus berlanjut dengan munculnya pemimpin-pemimpin baru seperti Gusti Matseman, Gusti Acil, Gusti Arsat, dan Antung Durrachman. Walaupun volume pertempuran semakin mengecil namun perlawanan tersebut terus berlanjut sampai awal abad ke-20.

2. Perlawanan Rakyat Sulawesi

Di Sulawesi Selatan terdapat banyak sekali kerajaan-kerajaan, di antaranya yang terpenting ialah kerajaan Bone, Makasar dan Luwu. Bilamana munculnya kerajaan Bone tidak dapat diketahui dengan pasti. Yang diketahui betul hanya bahwa Bone itu mengadakan persekutuan

dengan Luwu dan Wajo pada akhir abad ke-16. Hal ini dapat diketahui sewaktu kerajaan Makasar mengembangkan kekuasaannya ke daerah Bugis.

Sewaktu Makasar diperintah Sultan Hasanuddin, Bone ditaklukkan (1640). Kerap kali Bone berusaha memerdekakan diri di bawah Aru Palaka (raja Sopeng) misalnya, tetapi semua daya upaya tak berhasil. Sewaktu pecah perang Makasar (1666), Aru Palaka memihak Belanda. Setelah Makasar kalah dan diakhiri dengan Perjanjian Bongaya (1667), Bone dimerdekakan dengan Aru Palaka sebagai rajanya. Sejak itu pengaruh Bone semakin besar.

Pada tahun 1824 mulailah terjadi perselisihan antara kerajaan Bone dan pemerintah Belanda. Sebab-sebabnya karena Bone menolak pembaharuan perjanjian Bongaya. Dalam perselisihan itu Bone mendapat bantuan sepenuhnya dari kerajaan Bugis lainnya seperti Tanette dan Supa. Jenderal van Geen yang dikirim ke Sulawesi memang dapat merampas dan membakar ibukota Bone, tetapi kemenangan ini tidak begitu berarti. Ratu Bone dapat menyelamatkan diri dan terus mengadakan perlawanan, sedangkan van Geen tidak memperoleh bala bantuan berhubung dengan pecahnya Perang Diponegoro, bahkan tentara van Geen dipanggil kembali untuk membantu di Jawa.

Sesudah Perang Diponegoro selesai, pemerintah Belanda mulai melakukan pendekatan kepada raja Bone, yakni melanjutkan upaya pembaharuan perjanjian Bongaya. Walaupun raja Bone menyetujui pembaharuan tersebut, namun perlawanan terus berlangsung.

Perlawanan rakyat Bone dipimpin oleh Ratu Bone (raja perempuan). Pada tahun 1850 ia memerintahkan untuk menghancurkan semua kapal yang berbendera Belanda. Belanda menilai bahwa perlawanan tersebut membahayakan kedudukan Belanda. Karena itu Belanda melakukan ekspedisi baru, ibukota Bone direbut, tetapi Ratu Bone berhasil menyelamatkan diri.

Untuk memperkokoh kekuasaan Belanda di Bone, maka keturunan Aru Palaka yang membantu Belanda diangkat menjadi raja Bone dengan perjanjian:

- a. Aru Palaka mengakui kekuasaan pemerintah Belanda.
- b. Sebagian dari daerah Bone diserahkan kepada pemerintah Belanda.

Pada akhir abad ke-19 Bone mulai bergerak lagi. Ternyata pengaruhnya masih besar di kerajaan-kerajaan Bugis lainnya. Karena itu

pada tahun 1905 Belanda menyerang kembali kerajaan Bone. Walaupun kerajaan Bone mendapat dukungan penuh dari kerajaan-kerajaan Bugis yang lain, tetapi karena persenjataan Belanda jauh lebih sempurna akhirnya mereka menderita kekalahan juga.

Walaupun raja-raja Bugis dapat dikalahkan, namun rakyat Sulawesi terus melakukan gerilya. Baru pada tahun 1906 perlawanan rakyat Sulawesi dapat dipadamkan. Untuk mencegah timbulnya perlawanan lagi, maka beberapa daerah rawan diperintah langsung oleh Belanda, sedangkan daerah-daerah yang loyal kepada Belanda dijadikan daerah swapraja (daerah-daerah yang berdiri sendiri di bawah pengawasan pemerintah Belanda).

3. Perlawanan Rakyat Bali (1846-1908)

Nama Bali dikenal dalam sejarah Indonesia mulai zaman Erlangga maupun Majapahit (Gajah Mada). Hubungan antara Bali dan Jawa erat sekali. Pada zaman Majapahit banyak penduduk kerajaan ini yang pindah ke Bali. Dengan bangga mereka menamakan dirinya wong Majapahit untuk membedakan diri dari penduduk Bali asli yang masih terdapat di pegunungan dan dikenal sebagai Bali-aga (orang Bali asli).

Seorang Pangeran Majapahit yang bertugas membereskan pemerintahan di Bali, akhirnya mengangkat dirinya menjadi raja dengan gelar Dewa Agung Ketut dan bersemayam di Gelgel. Pada abad ke-17 ibukota pindah ke Klungkung, tetapi kemudian pecah menjadi sembilan kerajaan di antaranya yang terkenal adalah Klungkung, Gianyar, Badung, Karangasem, dan Buleleng.

Salah satu hak yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan di Bali di daerah pantai ialah hak untuk menjalankan hukum tawan karang. Menurut hukum itu, raja Bali berhak untuk merampas muatan kapal yang terdampar di pantai wilayah kerajaannya. Sewaktu Belanda berada di Indonesia, Bali masih merupakan kerajaan-kerajaan merdeka. Belanda juga melakukan perdagangan (terutama perdagangan budak) dengan kerajaan-kerajaan Bali.

Dalam perdagangannya itu, telah berulang kali kapal Belanda terdampar di salah satu pantai dari kerajaan Bali dan muatannya dirampas oleh raja. Belanda telah mengajukan protes dan mengadakan perjanjian-perjanjian yang menyangkut pembebasan kapal-kapal Belanda. Tetapi raja-raja Bali sering tidak pernah mengindahkannya.

Di antara raja-raja Bali yang pernah diajak untuk mengadakan perjanjian pada tahun 1841 itu ialah raja-raja Klungkung, Buleleng, Badung dan Karangasem. Dalam perjanjian itu sesungguhnya raja Bali telah dipaksa untuk mengakui kedaulatan pemerintah Belanda, dan mengizinkan pengibaran bendera Belanda di kerajaannya. Tetapi kesemuanya itu tidak dilaksanakan oleh raja-raja Bali karena mereka dipaksa.

Karena merasa diingkari, maka Belanda memutuskan untuk menggunakan kekerasan dalam usaha untuk menundukkan raja-raja Bali tersebut. Pada tahun 1846 Belanda mengirimkan ekspedisi militernya ke daerah Buleleng. Karena itu Gusti Ketut Jelantik menyiapkan pasukan untuk menghadapi kedatangan Belanda.

Sebelum melakukan serangan, Belanda mengeluarkan ultimatum yang isinya agar Buleleng (1) mengakui kekuasaan Belanda, (2) hak tawan karang harus dihapus, dan (3) memberi perlindungan kepada perdagangan Belanda. Karena ultimatum Belanda tak diindahkan, akhirnya Belanda menyerbu Buleleng. Sementara itu Karangasem memihak Buleleng, sehingga berkobar perang Belanda-Bali.

Dalam menghadapi perlawanan rakyat Bali, Belanda terpaksa mengerahkan ekspedisi secara besar-besaran sebanyak tiga kali. Ekspedisi pertama dilakukan tahun 1836 dengan kekuatan 1700 tentara. Serangan pertama ini Belanda gagal menundukkan rakyat Bali. Belanda mengajak berunding, tetapi ternyata hanya taktik untuk melakukan penyerbuan kembali.

Sementara itu pasukan Bali di bawah Gusti Jelantik membangun benteng di Jagaraga dan mulai menyerang Belanda. Karena serangan tersebut, Belanda lalu melakukan ekspedisi kedua tahun 1848. Pertempuran berkobar hebat di benteng tersebut. Dalam pertempuran itu Belanda kehilangan 5 perwiranya dan 75 prajuritnya. Namun benteng Jagaraga gagal dikuasai. Setelah bala bantuan datang dari Jakarta, Belanda kembali menyerang. Namun serangan ke benteng Jagaraga dapat ditangkis. Pada tahun 1849 Belanda melakukan ekspedisi yang ketiga dengan kekuatan lebih dari empat ribu prajurit dengan tiga ribu pasukan tenaga pengangkut. Pasukan besar-besaran tersebut disambut dengan tiga ribu prajurit Bali dengan senjata tradisional. Sedangkan pasukan tambahan ada 10-20 ribu orang dari Buleleng dan Karangasem. Pertempuran meletus di sekitar benteng Jagaraga. Benteng tersebut dijaga sekitar 15 prajurit.

Pertempuran berlangsung beberapa hari sehingga kedua belah pihak mengalami kelelahan. Karena kalah dalam persenjataan, pasukan Bali mengundurkan diri dari benteng Jagaraga. Dengan demikian benteng tersebut jatuh ke tangan Belanda. Sejak itu perlawanan pindah ke daerah Karangasem dan Klungkung dengan pimpinan Gusti Jelantik. Perlawanan baru mengendor akhir abad ke-19, setelah sebagian besar kerajaan Bali ditaklukkan Belanda.

Pada tahun 1904 sebuah kapal dagang Cina terdampar di pantai timur Badung. Kapal tersebut dirampas oleh penduduk di situ. Cina lalu lapor kepada Belanda. Kerajaan Badung dipersalahkan oleh Gubernur dan disuruh membayar denda. Perintah itu ditolak oleh raja Badung. Sikap raja Badung itu didukung oleh raja-raja Bali, sehingga pecah perang Bali-Belanda. Belanda berhasil merebut ibukota Denpasar. Akibatnya raja-raja Bali melakukan puputan yaitu melawan habis-habisan dengan diikuti sanak-saudaranya, para bangsawan lainnya dan kaum putri, bersenjata tombak dan keris keramat. Mereka memilih gugur di medan perang dari pada menyerah kepada Belanda.

Pada tahun 1908 kerajaan Klungkung diserang Belanda. Raja Klungkung dibantu oleh seluruh kaum bangsawan, wanita dan anak-anak mengadakan puputan sewaktu diserang Belanda itu, lantaran tidak mau tunduk kepada peraturan-peraturan yang diadakan oleh pemerintah Belanda. Sesudah Klungkung diduduki maka berarti seluruh Bali dikuasai oleh pemerintah Belanda.

F. Perang Aceh 1873-1904

Setelah Perang Padri berakhir, pada tahun 1873 di Sumatera berkobar lagi perlawanan terhadap Belanda yakni Perang Aceh. Penyebab terjadinya Perang Aceh terutama karena nafsu Belanda untuk menguasai daerah ini. Sebelumnya, mereka tidak berani menduduki Aceh karena terikat Traktat London 1824. Traktat London II itu mewajibkan Belanda menghormati kedaulatan Aceh. Namun setelah terjadi Traktat Sumatera tahun 1871 sebagai perbaikan Traktat London II, Belanda bebas meluaskan wilayahnya ke seluruh Sumatera, termasuk Aceh.

Dengan terjadinya traktat tersebut, Belanda khawatir kalau Aceh jatuh ke tangan bangsa asing lain seperti Turki, Italia, Perancis atau Amerika. Sesudah tersiar kabar bahwa Aceh mengadakan hubungan dengan Amerika, maka pemerintah Belanda mengirimkan

Nieuwenhuisen (komisaris Belanda) ke Aceh, untuk menuntut, supaya Aceh mengakui kekuasaan Belanda. Perundingan-perundingan yang diadakan tak berhasil. Dari sebab itu Belanda menyatakan perang kepada Aceh.

Pada tahun 1873 Belanda mengirimkan ekspedisi pertama dengan 3193 prajurit dipimpin oleh Jenderal Kohler. Setelah beberapa lama terjadi tembakan-tembakan di daerah pantai, pasukan Aceh mengundurkan diri dan berkubu di sekitar Mesjid Raya. Belanda langsung menyerbu Mesjid Raya dengan tembakan-tembakan meriam, sehingga mesjid itu terbakar. Pasukan Aceh mundur dan Mesjid Raya diduduki Belanda. Namun pasukan Aceh berhasil menembak Jenderal Kohler sehingga tewas, sehingga pimpinan tentara Belanda diambil alih oleh Kolonel van Dalen dan menarik diri dari Mesjid Raya.

Pasukan Aceh melakukan konsolidasi di sekitar istana Sultan Mahmudsyah. Pasukan-pasukan itu terus digerakkan untuk melakukan serangan-serangan terhadap pos-pos Belanda. Dengan demikian usaha Belanda untuk menundukkan Aceh dengan serangan terbuka mengalami kegagalan, sehingga Belanda memilih memblokir Aceh.

Ketika itu muncullah tokoh-tokoh pemimpin seperti Panglima Polem, Teuku Imam Lueng Bata, Cut Banta, Teungku Cik di Tiro, Teuku Umar, dan istrinya Cut Nya' Din, dan masih banyak pemimpin Aceh lainnya yang memimpin perlawanan di daerahnya masing-masing.

Dalam ekspedisi kedua (1874), digerakkanlah 8000 prajurit Belanda dengan pimpinan Jenderal J. van Swieten menyerbu Aceh. Sasaran utama adalah istana Sultan Mahmudsyah. Istana itu berhasil direbut Belanda, lalu dijadikan pusat pemerintahan Belanda di daerah yang disebut Kotaraja. Belanda lalu memproklamasikan bahwa Aceh sudah berada di bawah kekuasaan Belanda.

Sementara itu Sultan Mahmudsyah meninggal, dan baru 10 tahun kemudian diganti oleh anaknya, Sultan Muhammad Daudsyah. Ia memerintah dibantu oleh dewan Mangkubumi, dan pusat pemerintahannya berada di daerah pengungsian, serta berpindah-pindah untuk menghindari penyerangan Belanda.

Walaupun perlawanan panglima-panglima dan hulubalang-hulubalang lebih kuat dari sangkaan Belanda, tetapi tentara Belanda yang dipersenjatai lebih lengkap, di bawah pimpinan Jenderal van der Heyden (Jenderal Buta), akhirnya dapat menguasai Aceh Besar (1879).

Pemerintah Belanda menyangka bahwa dengan peristiwa ini perang Aceh benar-benar berakhir. Dari sebab itu pemerintahan militer diganti dengan pemerintahan sipil. Perhitungan itu salah. Sebab tak lama kemudian perlawanan menghebat kembali, sehingga terpaksa pemerintah sipil diganti dengan pemerintah militer.

Untuk memadamkan perlawanan rakyat Aceh, pemerintah Belanda memisahkan daerah Aceh sebelah utara dari Aceh sebelah selatan, sedangkan pantai laut dijaga oleh angkatan laut Belanda. Siasat ini disebut konsentrasistelsel, yaitu daerah yang dikuasai Belanda dimakmurkan agar orang-orang Aceh yang melakukan perlawanan meletakkan senjata dan kembali ke daerah yang aman dan makmur itu.

Dalam perkembangannya, siasat tersebut gagal, sebab pagar kawat berduri sebagai daerah pembatas tersebut sering dirusak kaum gerilya dan penjaganya mati terbunuh. Sementara itu Teuku Umar yang sudah menyerah kepada Belanda (1893) pada tahun 1896 kembali melawan Belanda setelah berhasil membawa banyak senjata Belanda.

Dalam kondisi sulit ini muncullah seorang ahli bahasa-bahasa Timur dan hukum Islam Dr. Snouk Hurgronje sebagai penasehat dalam urusan pemerintahan sipil. Ia mempelajari bahasa, adat istiadat, kepercayaan dan waktu orang-orang Aceh. Dari hasil penelitiannya akhirnya dapat diketahui bahwa sebenarnya Sultan Aceh itu tidak mempunyai kekuatan apa-apa tanpa persetujuan dari kepala-kepala yang ada di bawahnya. Selain itu juga dijelaskan bahwa pengaruh kaum ulama pada rakyat adalah sangat besar. Karena itu dirasa sulit untuk menundukkan rakyat yang berkeyakinan agama yang kuat seperti rakyat Aceh itu.

Berdasarkan hasil penelitian itu, lalu dilakukan langkah-langkah yang jitu, yaitu dengan menggunakan taktik memecah belah kekuatan yang ada di kalangan rakyat Aceh. Kaum ulama yang memimpin pertempuran harus dihadapi dengan kekuatan senjata, sedangkan para bangsawan dibuka kesempatan untuk masuk ke dalam kelompok pamongpraja di lingkungan pemerintah Belanda.

Untuk menghadapi kaum ulama, Belanda melakukan serangan habis-habisan. Jenderal van Heutz membentuk pasukan marsose (istimewa) untuk mengejar tentara Aceh sampai tertangkap atau terbunuh. Sewaktu menyerbu kedudukan Belanda di Meulaboh (1899), Teuku Umar gugur.

Panglima Polem terus melakukan perlawanan di daerah bagian timur. Pihak Belanda terus berusaha untuk menangkapnya tetapi sulit. Oleh karena itu pihak Belanda menggunakan taktik baru, yakni dengan mengadakan penculikan isteri Sultan. Dengan mengadakan tekanan-tekanan yang keras akhirnya Sultan Muhammad Dawud menyerah kepada Belanda tahun 1903.

Dalam upayanya untuk menangkap Panglima Polem, Belanda juga menggunakan siasat menangkap isteri, ibu dan anak-anak Panglima Polem sambil menekan terus menerus terhadapnya. Setelah mengalami tekanan yang berat, maka akhirnya Panglima Polem menyerah pada tahun 1903 pula.

Dengan hilangnya pemimpin-pemimpin yang tangguh itu, maka perlawanan rakyat Aceh makin kendor, dan di lain pihak Belanda dapat memperkuat kekuasaannya di daerah itu. Sekalipun demikian perlawanan rakyat Aceh boleh dikatakan merupakan perlawanan yang paling lama dan yang paling besar selama abad ke-19.

Dalam rangka untuk memastikan kemerosotan perlawanan Aceh, pada tahun 1904 Jenderal van Daalen melakukan ekspedisi lintas pedalaman, khususnya antara Gayo dan Alas. Dalam ekspedisi tersebut pasukannya memang tidak mendapatkan perlawanan suatu apa sehingga pada tahun 1904 itu pula perlawanan Aceh dinyatakan berakhir. Namun perlawanan masih berlangsung terus, secara perseorangan maupun dalam kelompok; hanya semakin lama semakin terencil sifatnya.⁸

Setelah perlawanan Aceh berakhir, maka daerah Aceh dibagi-bagi dalam swapraja-swapraja. Mereka diikat oleh pemerintah Belanda dengan jalan menandatangani pelakat pendek, suatu perjanjian yang menerangkan dengan singkat:

- a. Tiap-tiap swapraja harus mengakui kekuasaan pemerintah Belanda.
- b. Suatu swapraja tidak boleh mengadakan hubungan dengan pemerintah asing lainnya.
- c. Perintah pemerintah Belanda harus dijalankan.

Walaupun perlawanan rakyat Aceh sudah berakhir, di Sumatera masih ada perlawanan-perlawanan yang lain yaitu perlawanan rakyat

⁸ Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hal. 390.

Batak yang dipimpin Si Singamangaraja XII (1878-1907), perlawanan di Sumatera Selatan dipimpin oleh Raden Intan serta daerah-daerah lainnya yang dipimpin oleh pemimpin setempat.

Di atas telah digambarkan bagaimana daerah-daerah di Indonesia satu persatu jatuh ke tangan Belanda. Dengan berbagai cara, rakyat Indonesia di berbagai daerah berusaha terus untuk bertahan. Bila semua raja-raja di Indonesia memiliki armada-armada niaga yang besar, maka setelah kerajaannya ditundukkan oleh Belanda, maka armada-armadanya segera ditumpas oleh Belanda.

Di samping itu, peraturan Belanda yang monopolitis mengakibatkan terdesaknya ke sudut kebebasan perdagangan rakyat Indonesia. Karena berjuang untuk kelangsungan hidupnya, rakyat yang hidup di pantai-pantai selalu berusaha menerobos monopoli Belanda. Tindakan seperti itu oleh Belanda disebut perdagangan gelap atau penyelundup. Namun demikian, tindakan-tindakan rakyat Indonesia tersebut jelas merupakan bentuk perlawanan yang tak henti-hentinya terhadap imperialisme Barat.

Daftar Pustaka

- Boek, J.O.M., *The Economic Development of The Netherlands Indies*, New York, Mc Graw-Hill, 1943.
- Cady, J.F., *South East Asia Its Historical Development*, New York, Mc Graw-Hill, 1964.
- Day, Clive, *The Dutch in Java*, Kualalumpur, Oxford University Press, 1966.
- Furnivall, J.S., *Colonial Practice and Policy*, New York, Inversity Press, 1956.
- Hall, D.G.E., *A History of South-East Asia, Third Edition*, The Macmillan Ltd, London, 1977.
- Harrison, Brian, *South-East Asia, A Short History*, Third Edition, London, Macmillan Press, Ltd, 1972.
- Khoo, Gilbert, *Sejarah Asia Tenggara Sejak Tahun 1500*. Kualalumpur, Fajar Bakti SDN. BHD, 1976.
- Lenin, V. I., *Selected Works*, New York, Mc. Graw-Hill, 1943.
- Moon, Parker Th., *Imperialism and World Politics*, New York, 1963.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Sejarah Ekonomi Indonesia dari Segi Sosiologi Sampai Akhir Abad XIX*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1984.
- Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari Emporium ke Imperium*, Jakarta, Gramedia, 1987.
- , *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*, Jilid 2, Jakarta, Gramedia, 1990.